

RAMADAN BERKAH

Bank BPD DIY Salurkan 8.441 Paket Sembako

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY senantiasa memperkuat komitmen kepedulian sosial dengan berbagi keberkahan kepada sesama pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, dengan menyalurkan 8.441 paket sembako senilai Rp 1.055.125.000.

Paket bantuan secara simbolis diserahkan Direktur Utama (Dirut) Santoso Rohmad, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah R Agus Trimurjanto, Direktur Umum Hudan Mulyawan, Direktur Kepatuhan Dian Ari Ani, serta jajaran pejabat Bank BPD DIY kepada perwakilan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta serta warga sekitar Kantor Pusat Bank BPD DIY.

Santoso Rohmad menyatakan, tak sekadar meningkatkan



KR-istimewa

Jajaran Direksi Bank BPD DIY menyerahkan paket sembako Ramadan secara simbolis kepada perwakilan penerima.

keimanan dalam menjalankan ibadah puasa semata, bulan Ramadan merupakan momentum berbagi terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Dalam Ramadan kali ini, Bank BPD DIY melakukan pentasyarufan Zakat, Infak, dan Sedekah

(ZIS) bagi masyarakat DIY, utamanya bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Alhamdulillah, Bank BPD DIY bisa berbagi keberkahan kembali kepada masyarakat pada bulan suci Ramadan 2025. Berkat ZIS yang dihimpun dari karyawan,

Bank BPD DIY menyalurkan dan membagikan paket sembako 8.441 paket, total senilai Rp 1.055.125.000 kepada kelompok masyarakat penerima," ujar Santoso didampingi Pemimpin UUS Bank BPD DIY Arif Wijayanto di Kantor Pusat Bank BPD DIY, Jumat (14/3) sore.

Santoso menyampaikan, sasaran penyaluran paket sembako diutamakan kelompok warga sekitar Kantor Bank BPD DIY yang tersebar di DIY. Ke depan, penyaluran paket sembako juga diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat meliputi petugas kebersihan, buruh gendong, panti asuhan, pengemudi becak, serta masyarakat di sekitar Kantor Layanan Bank BPD DIY.

(Ira)-d

Hikmah Ramadan

Kekuatan Sedekah

Edo Segara Gustanto



ADA tujuh kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW. saat bulan Ramadan, di antaranya *qiyamul lail* (salat tarawih), memberi buka puasa kepada orang lain, memperbanyak tilawah Alquran, meningkatkan amaliah, memburu malam *lailatul qadar*, bersedekah, dan menunaikan zakat fitrah. Sedekah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Ekonomi Islam menempatkan sedekah sebagai salah satu instrumen utama dalam distribusi kekayaan. Sedekah tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual seseorang, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian. Dengan berbagi rezeki, roda ekonomi dapat bergerak lebih dinamis karena terjadi aliran dana dari mereka yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan (*dhuafa*). Hal ini menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sedekah dan Pertumbuhan Ekonomi

Sedekah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplikatif. Dana yang disedekahkan akan kembali berputar dalam sistem ekonomi melalui konsumsi dan investasi produktif. Hal ini menciptakan keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banyak orang beranggapan bahwa sedekah mengurangi harta, tetapi dalam Islam, sedekah justru membawa keberkahan dan rezeki yang berlipat. Contoh nyata dari manfaat sedekah terlihat pada tokoh-tokoh besar seperti Bill Gates dan Bunda Teresa. Mereka tetap berkecukupan meski banyak berbagi, bahkan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep ini berlaku universal tanpa memandang latar belakang seseorang, karena pada dasarnya sedekah adalah bagian dari redistribusi kekayaan yang cukup efektif.

Dampak Ekonomi Sedekah

Dampak ekonomi dari sedekah dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu jangka pendek dan jangka

panjang. Dalam jangka panjang, sedekah mendatangkan pahala dan balasan surga. Sementara dalam jangka pendek, sedekah membantu meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, sedekah juga memberikan manfaat non-material seperti kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam berbagai urusan.

Sejarah membuktikan bahwa banyak pengusaha sukses yang menjadikan sedekah sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Mereka percaya bahwa semakin banyak berbagi, semakin besar keberkahan yang mereka dapatkan. Sedekah bahkan dapat meningkatkan citra perusahaan dan menjadi bagian dari strategi pemasaran sosial yang memperkuat loyalitas pelanggan.

Bolehkah Sedekah dengan Pamrih?

Bagaimana jika sedekah dilakukan dengan pamrih? Pada awalnya, seseorang mungkin bersedekah dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Namun, dengan kebiasaan, keikhlasan akan tumbuh secara alami. Allah SWT memahami bahwa manusia cenderung berharap balasan, sehingga dalam ajaran Islam, pahala dan surga dijanjikan sebagai motivasi untuk berbuat baik. Karena itu, berharap balasan dari Allah saat bersedekah bukanlah hal yang salah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar.

Di bulan Ramadan ini, kita dapat meningkatkan ibadah dengan bersedekah kepada masjid, panti asuhan, atau badan/lembaga zakat terpercaya. Dengan bersedekah, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam membangun perekonomian umat yang lebih sejahtera. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam bersedekah dan melipatgandakan balasan-Nya. *Wallahu alamu bish-Sholih.*

Edo Segara Gustanto SE ME,
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIQ
An Nur Yogyakarta.

Revisi

Prasetyo mengatakan, penugasan semacam itu tidak boleh dimaknai sebagai bentuk dwifungsi ABRI, melainkan sebagai bentuk kontribusi TNI ketika dibutuhkan sesuai keahliannya.

Sebagai informasi, perubahan UU No 34 Tahun 2004 mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga. Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada ke-

mungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI digulirkan sebagai bentuk penyesuaian institusi tersebut dengan perkembangan zaman. Menurutnya, penguatan posisi TNI perlu dipertegas mengingat UU tersebut tidak pernah dilakukan revisi lebih dari dua dekade.

"Saya kira penguatan posisi TNI perlu dipertegas dan saya kira UU TNI kan sudah dilakukan revisi terakhir 25 tahun lalu, jadi penyesuaian-penyesuaian terhadap keadaan," kata Muzani di Kompleks Parlemen.

Apalagi, lanjutnya, TNI sebuah kekuatan yang sangat penting, sangat vital perannya bagi negara. Menyoal hal tersebut, ia memandang posisi dan sejumlah isu menyangkut TNI harus dirumuskan kembali dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI). Misalnya, terkait perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI.

Sambungan hal 1

CPNS

dalam konferensi pers Pengangkatan CASN 2024 di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jakarta, Senin (17/3).

Dikatakan, penyelesaian pengangkatan CASN ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga maupun masing-masing Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Presiden juga memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai jadwal terbaru yang telah

ditetapkan.

Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN berkenaan dengan proses penerimaan PPPK 2024. "Kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir untuk proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini, sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan," ujarnya.

Proses tersebut bukanlah mengenai membuka

lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mempersilakan instansi yang siap untuk mengangkat CASN 2024 bisa mulai dilakukan pada April 2025. "Biasanya dalam penyelesaian CASN memang ada waktu menunggu dan ini kita sudah percepat. Jadi, mungkin nanti instansi masing-masing kan juga akan melakukan pemanggilan kepada calon-calon ASN," kata Rini.

Sambungan hal 1

Polda

Adi Vivid mengatakan, prediksi 6 juta pemudik bakal keluar atau masuk DIY ini lebih rendah dibandingkan dengan lonjakan saat perayaan Tahun Baru 2025. Jadi kepadatan lalu lintas selama Lebaran diperkirakan lebih terkendali dibandingkan Tahun Baru. Kendati demikian, jajaran Kepolisian tetap melakukan antisipasi dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas.

"Saat pergantian tahun baru, kepadatan lebih tinggi karena tidak ada yang keluar dari Yogyakarta. Berbeda dengan momentum Lebaran, masyarakat Yogyakarta juga ada yang melakukan perjalanan keluar kota. Adapun jumlah kendaraan yang akan masuk DIY prediksinya 1,5 juta," ungkapnya.

Sebagai bagian dari pengendalian lalu lintas,

aparat akan menerapkan rekayasa arus di sejumlah titik strategis. Salah satunya pemasangan sekat di beberapa akses utama menuju Kota Yogyakarta.

Sekda DIY Beny Suharsono menambahkan, keberadaan tol fungsional akan mempermudah akses masuk wilayah DIY. Hal itu berpotensi meningkatkan kepadatan kendaraan. Karenanya rekayasa lalu lintas diharapkan bisa berfungsi sebagai pengendali agar arus kendaraan tidak menumpuk di dalam kota. Bagi masyarakat yang tidak memiliki tujuan utama ke pusat kota nantinya akan diarahkan menggunakan jalur alternatif. "Pengendara dari arah Timur menuju Prambanan, misalnya, akan dialihkan ke Jalur Selatan atau Utara tanpa perlu masuk ke pusat

kota. Aparat Kepolisian juga akan memberikan imbauan langsung kepada pengendara yang masih memilih jalur menuju pusat kota agar beralih ke Ringroad," terang Beny seraya menambahkan, untuk memastikan kelancaran pengawasan, Kepolisian telah menyiapkan tiga titik pemantauan CCTV bagi kendaraan yang masuk dan satu titik pemantauan untuk kendaraan keluar.

Menurutnya, Pemda DIY juga akan mengoptimalkan Back Office Smart Province di Kantor Gubernur DIY, Keparitahan. Dengan adanya tambahan kamera pengawas, sistem tersebut memungkinkan pemantauan kondisi lalu lintas secara real-time. "Pengendara yang masuk ke wilayah DIY,"

Sambungan hal 1

Now

Jika Presiden PS mampu menuntaskan kedua kasus tersebut maka dipastikan akan direspon oleh investor secara positif dan sebaliknya.

Kepastian hukum dijadikan salah satu 'sinyal' oleh pasar dan investor untuk memutuskan investasi di suatu wilayah atau negara. Bagi (calon) investor kepastian hukum yang diterapkan oleh rezim pemerintahan menjadikan semakin yakin mereka akan berinvestasi di negara tersebut.

Jika berbagai kasus korupsi tidak dituntaskan maka investor, termasuk asing, akan menganggap rezim pemerintahan yang berkuasa belum mampu menegakan hukum serta dianggap permisif terhadap korupsi, kolusi dan sejenisnya. Bagi investor hal tersebut identik dengan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Pemerintahan PS juga mempunyai pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki beberapa kebijakan peninggalan Pemerintahan Jokowi. Salah satu kebijakan tersebut adalah terkait dengan regulasi atau peraturan yang mengatur masuknya bahan impor, misalnya Permendag No. 8 Tahun 2024.

Dalam era perdagangan bebas, regulasi yang melindungi atau proteksi produk dalam negeri tetap

diperlukan agar tetap mampu berkompetisi dalam harga maupun kualitas. Penulis berharap pelaku industri juga harus berproduksi dengan efisien agar mencapai skala ekonomi (economies of scale) yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Kemudahan dalam berusaha juga menjadi salah satu pertimbangan investor asing. Dari mulai proses pengurusan perizinan sampai dengan beroperasi usaha, pemerintah baik pusat dan daerah, harus memberikan kemudahan serta menghindari berbagai pungutan yang tidak resmi. Berbagai pungutan tersebut akan dimasukkan oleh pengusaha dalam biaya operasi dan ujungnya dibebankan kepada konsumen. Dalam perizinan berusaha, pelaku usaha menuntut proses yang cepat, murah dan tepat.

Dalam upaya untuk menarik investasi asing, Pemerintahan PS berhadapan dengan kompetitor beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Daya tarik investasi mereka khususnya dalam insentif pajak dan non-pajak, produktivitas tenaga kerja, kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi di

Indonesia, Pemerintahan PS harus memperhatikan beberapa hal yang telah dilakukan oleh negara tetangga kompetitor termaksud. Jika tidak dipastikan akan berujung batalnya beberapa investor global dan mereka akhirnya memilih negara tetangga untuk lokasi investasinya.

Sekarang ini momentum yang tepat bagi Presiden PS untuk menuntaskan beberapa kasus korupsi dan memperbaiki iklim berusaha agar daya tarik investasi Indonesia meningkat. Kondisi tersebut dapat mendorong meningkatnya (realisasi) investasi asing dan domestik. Investor akan merasa nyaman dan aman berinvestasi di Indonesia karena dukungan kemudahan investasi, kepastian hukum dan sejumlah insentif yang menarik.

Peningkatan investasi merupakan salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, Presiden PS menargetkan pertumbuhan Indonesia diharapkan mencapai 8% pada tahun 2029. Penulis menunggu gebrakan Presiden PS untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. Now or Never!

(Penulis adalah Pengusaha Senior DIY dan Wakil Ketua KADIN DIY Bidang Organisasi dan Keanggotaan)-d

Sambungan hal 1

Prabowo:

"Masih terdapat penyimpangan dan penyelundupan yang merugikan bangsa dan rakyat. Ini akan kita tindak," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menekankan, praktik ilegal tersebut tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri dan lapangan kerja bagi ratusan ribu rakyat Indonesia. "Penyimpangan dan penyelundupan tidak bisa kita biarkan karena mengancam industri kita dan kesejahteraan pekerja," tambahnya.

Dengan adanya fasilitas pemurnian ini, pemerintah berharap industri tambang Indonesia semakin mandiri dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Sambungan hal 1

Presiden dalam pidatonya juga mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur dan bekerja sama dalam menjaga serta mengelola kekayaan alam Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Prabowo kemudian menyebut smelter Freeport Indonesia di Gresik itu diyakini sebagai pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia, terutama yang pengolahannya dari hulu ke hilir. Presiden berterima kasih kepada Freeport Indonesia dan Freeport McMoran yang telah beroperasi di Indonesia selama 50 tahun lebih. Prabowo, dalam sambutannya, memuji Freeport McMoran yang diyakini ikut berkontribusi membangun perekonomian nasional.

(Ant/Obi)-d

Eks

Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH), M Fauzi alias Pablo dari pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS) dari pihak swasta

Sementara itu, Kantor Dinas PUPR Kabupaten OKU, kemarin sepi setelah KPK melakukan OTT terhadap kepala dinas setempat Sabtu lalu. Pantauan di lapangan pada Senin sekitar pukul 09.30 WIB, Kantor Dinas PUPR OKU di Kelurahan Kemelak Kecamatan Baturaja Timur masih terlihat lengang.

Sejumlah pegawai tetap menjalankan aktivitas rutin, namun akses menuju ruang kepala dinas tertutup rapat, sehingga awak media tidak dapat melihat langsung apakah ada penyegelan. Para pegawai di kantor tersebut enggan memberikan komentar soal OTT yang dilakukan KPK terhadap Kepala Dinas PUPR, tiga anggota dewan dan dua kontraktor.

Sekretaris Dinas PUPR OKU, Darajatun saat ditemui usai rapat mengatakan belum mengetahui apakah benar pintu ruangan Kadin PUPR OKU telah disegel KPK. Ia juga belum bisa berkomentar tentang penangkapan Kepala Dinas PUPR OKU oleh KPK, Sabtu lalu itu.

Sementara, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di

Kabupaten OKU mengungkap fakta baru. Nov selaku Kepala Dinas PUPR OKU sempat membeli mobil Toyota Fortuner baru dari hasil fee proyek yang diterimanya dalam kasus tersebut yang kini dijadikan barang bukti.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah

anggota DPRD OKU yaitu FJ, MFR, dan UH diduga meminta jatah pokok pikiran (pokir) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU tahun 2025.

(Ant/Has)-d



Prakiraan Cuaca Selasa, 18 Maret 2025

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95



Wajar Bimantoro, SSn, Mdes
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

"Strategi Komunikasi Publik di Bulan Puasa: Ujian Pemerintahan Prabowo"

menjadi periode yang sensitif dalam komunikasi publik. Di satu sisi, masyarakat menuntut kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan, sementara di sisi lain, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara harapan publik dan realitas kebijakan yang dapat dijalankan. Manajemen komunikasi yang buruk dapat memicu ketidakpuasan dan memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.

Salah satu tantangan utama dalam komunikasi selama Ramadan adalah pengendalian harga bahan pokok. Lonjakan harga sering kali terjadi menjelang dan selama bulan puasa, yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Jika komunikasi pemerintah tidak jelas atau kurang responsif, ketidakpercayaan publik bisa meningkat, yang pada akhirnya dapat memperlemah legitimasi pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintahan Prabowo harus

memastikan strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah berupaya keras menjaga stabilitas harga.

Pemerintahan Prabowo dan Tantangan Komunikasi di Bulan Puasa

Di tengah berbagai permasalahan politik dan ekonomi yang sedang dihadapi, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat mengelola komunikasi dengan lebih baik selama Ramadan. Beberapa tantangan utama dalam komunikasi pemerintah saat ini meliputi: Pertama adanya Inflasi dan Harga Bahan Pokok yang kerap kali hadir saat bulan puasa akan mengganggu tahun. Kenaikan harga sembako seperti beras, minyak goreng, dan daging selama Ramadan menjadi isu yang harus dihadapi. Pemerintah harus memiliki strategi komunikasi yang jelas dalam menenangkan publik, misalnya dengan transparansi dalam kebijakan stabilisasi harga dan ketersediaan stok pangan. Jika

kommunikasi tidak dikelola dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa melemah.

Kedua, kebijakan subsidi dan bantuan sosial yang slalu dianggap kurang. Pemerintahan Prabowo telah merencanakan berbagai skema subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Namun, distribusi bantuan sering kali menimbulkan polemik, terutama jika ada ketidakseimbangan dalam implementasi di lapangan. Komunikasi publik yang efektif, termasuk keterbukaan data penerima manfaat dan mekanisme penyaluran bantuan yang transparan, sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang politik.

Ketiga, polarisasi politik dan narasi publik yang kian lama slalu berganti dan berkembang. Dalam tahun pertama pemerintahannya, Prabowo harus menghadapi berbagai isu politik yang memerlukan strategi komunikasi yang tepat. Isu-isu seperti hubungan dengan oposisi,

kebijakan luar negeri, serta pengelolaan aspirasi umat Islam selama Ramadan dapat mempengaruhi stabilitas politik. Jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, kesalahpahaman dapat dengan mudah menyebar di masyarakat, terutama di era digital yang serba cepat.

Yang terakhir yang kian hangat adalah Kesejahteraan dan Ketenangan Sosial di masyarakat. Ramadan sering kali menjadi waktu refleksi bagi masyarakat, tetapi juga bisa menjadi periode di mana ketegangan sosial meningkat. Pemerintahan harus mampu meredakan berbagai potensi konflik, termasuk ketidakpuasan atas kebijakan tertentu. Komunikasi yang efektif dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan media sangat penting agar pesan pemerintah dapat diterima dengan baik.

Komunikasi Pemerintah dan Respons Publik

Sebagai contoh, dalam

beberapa minggu terakhir, terjadi kenaikan harga beras yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Jika pemerintah tidak segera memberikan pernyataan resmi yang meyakinkan atau tidak menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi situasi ini, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan. Oleh karena itu, komunikasi yang cepat, jelas, dan berbasis data sangat diperlukan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo juga harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi selama Ramadan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Misalnya, jika ada upaya stabilisasi harga melalui impor bahan pokok, maka pemerintah perlu menjelaskan alasan dan manfaatnya dengan cara yang dapat diterima oleh publik agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.

Jika kita renungi pada akhirnya manajemen komunikasi yang baik di



bulan puasa dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintahan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintahan Prabowo harus lebih proaktif dalam menyampaikan informasi yang akurat, menanggapi keresahan publik dengan cepat, dan membangun narasi yang positif di tengah tantangan politik dan ekonomi. Jika strategi komunikasi dijalankan dengan baik, pemerintah tidak hanya dapat menghindari krisis kepercayaan, tetapi juga memperkuat legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat.

Dalam konteks ini, Ramadan bukan hanya menjadi ujian spiritual bagi masyarakat, tetapi juga ujian besar bagi pemerintah dalam mengelola komunikasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya, khususnya rakyat Indonesia.